

## Lapas Kelas IIA Baubau Gelar Ikrar Bersih Narkoba dan Handphone Ilegal



Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP - Direktorat Jenderal Pemasarakan terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan di lingkungan lembaga pemsarakatan. Hal itu ditindaklanjuti melalui pelaksanaan Apel Bersama dan Ikrar Penguatan Pengawasan Pemsarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Baubau.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Direktorat Jenderal Pemsarakatan Nomor PAS-UM.01.01-150 Tahun 2026 tentang Instruksi Pelaksanaan "Ikrar dan Penguatan Pengawasan

Lanjut ke Hal: 7

## Prestasi Gemilang SMAN 1 Batauga, 146 Siswa Lulus 100 Persen, 10 Siswa Diterima PTN Haluoleo Tanpa Tes

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - SMA Negeri 1 Batauga, Kabupaten Buton Selatan, mencatatkan capaian membanggakan pada tahun ajaran 2025/2026. Sebanyak 146 siswa yang terdaftar sebagai peserta ujian dinyatakan lulus 100 persen.

Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 1 Batauga, La Ode Madi, S.Pd, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 421.6/005/2026 tentang kelulusan peserta didik pada satuan pendidikan.

"Dari total 146 siswa yang mengikuti ujian, seluruhnya dinyatakan lulus. Ini merupakan hasil kerja keras siswa, guru, serta dukungan orang tua," ujar La Ode Madi di acara ke lulusan Sekolah SMA 1 Batauga, Rabu (6/5/2026).

Selain kelulusan penuh, sekolah juga berhasil mengantarkan 10 siswanya lolos ke perguruan tinggi negeri tanpa tes melalui jalur seleksi nasional. Seluruhnya diterima di Universitas Halu Oleo dengan berbagai program studi.



Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 1 Batauga, La Ode Madi, S.Pd,

Adapun siswa yang diterima tersebut antara lain:

Muhammad Ikramu Barat (Ilmu Hukum)

Rosida (Agroteknologi)

Asrum Prasetya (Statistika)

(Nama tidak disebutkan) "Ilmu Keperawatan

(Nama tidak disebutkan) "Akuntansi

Alvin (Pendidikan Biologi)

Mutia Sharifah Rasifu (Ilmu Pemerintahan)

Zulaiha Nasarudin (Pendidikan Kimia)

Farnita (Ekonomi Manajemen)

Wa Ode Rizki Rahma-

nia (Ekonomi)

"Alhamdulillah, tahun ini ada 10 siswa kami yang diterima di UHO tanpa tes. Ini menjadi kebanggaan bagi sekolah dan motivasi bagi adik-adik kelasnya," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, pihak sekolah juga mengumumkan siswa berprestasi berdasarkan akumulasi nilai rapor semester 1 hingga semester 6 serta hasil ujian sumatif akhir. Dari penilaian tersebut, ditetapkan enam siswa terbaik.

Penilaian dibagi dalam dua kelompok, yakni

Lanjut ke Hal: 7

## Ujian Praktik Seni Budaya Kelas IX SMPN 1 Batauga Tampilkan Potensi dan Bakat Siswa



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP - SMP Negeri 1 Batauga, Kabupaten Buton Selatan, menggelar ujian praktik Seni Budaya bagi siswa kelas IX sebagai bagian dari rangkaian akhir kegiatan akademik tahun ajaran.

Kegiatan ini menjadi ajang bagi siswa untuk menampilkan bakat dan kreativitas di bidang seni.

Kepala SMPN 1 Batauga, Wa Ode Saniarti, S.Pd., M.Si, menjelaskan bahwa sebelumnya para siswa telah menyelesaikan

ujian TKA serta ulangan semester akhir. Setelah itu, dilanjutkan dengan ujian praktik di seluruh mata pelajaran, termasuk Seni Budaya yang dilaksanakan secara serentak pada hari ini.

"Untuk Seni Budaya, ada beberapa cabang yang diujikan seperti seni lukis, seni rupa, drama, menanyi, dan menari. Semua dilaksanakan dalam satu hari," ujarnya, Rabu (5/6/2026).

Ia menambahkan, pelaksanaan ujian praktik seni dikemas secara menarik dengan menghadirkan nuansa lomba.

Hasil karya siswa, khususnya lukisan, dipajang untuk dinilai, sementara penampilan tari dan musik ditampilkan oleh perwakilan masing-masing kelas.

Menurutnya, kegiatan ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bidang seni sesuai minat dan bakat masing-masing, tanpa adanya paksaan dari pihak guru.

"Kami tidak memaksakan siswa harus tampil di bidang tertentu. Mereka bebas memilih sesuai potensinya. Misalnya ada

Lanjut ke Hal: 7

## SMAN 2 Baubau Raih Juara Umum FLS3N Tingkat Kota, Borong 9 Medali Emas, Ini Dia Nama-namanya

Laporan: Firman

BAUBAU, BP - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMA Negeri 2 Baubau. Sekolah ini berhasil meraih juara umum pada ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) tingkat Kota Baubau tahun 2026.

Di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah La Hidi, S.Pd., M.Pd, sekolah ini berhasil meraih juara umum pada ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) tingkat Kota Baubau tahun 2026.

Capaian tersebut diraih setelah SMAN 2 Baubau memborong sembilan medali emas dari berbagai cabang lomba yang diikuti. Dari total 16 cabang lomba, sekolah ini mengirimkan peserta di 14 cabang dan hampir seluruhnya berhasil menorehkan prestasi.



Kepala Sekolah La Hidi, S.Pd., M.Pd,

"Alhamdulillah kami mendapatkan sembilan medali emas. Ini hasil kerja keras siswa dan guru pembina yang luar biasa," ujar La Hidi, Rabu (6/5/2026).

Adapun cabang lomba yang berhasil meraih juara pertama di antaranya desain poster, fotografi, in-

strumen solo gitar, jurnalistik, kriya, komik digital, nyanyi solo putra, monolog, dan tari kreasi. Selain itu, sejumlah cabang juga menyumbang juara dua dan tiga, seperti menulis cerpen, nyanyi solo putri,

Lanjut ke Hal: 7

## Lapas Kelas IIA Baubau Gelar Ikrar Bersih Narkoba dan Handphone Ilegal



Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkotika dan Penipuan”.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau, Abdul Waris, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemberantasan handphone ilegal di dalam lapas merupakan harga mati yang harus dijaga seluruh petugas.

Menurutnya, keberadaan handphone ilegal menjadi sumber berbagai tindak kejahatan yang dikendalikan dari dalam lapas, mulai dari peredaran narkoba hingga penipuan kepada masyarakat.

“Masalah terbesar di lapas saat ini adalah handphone ilegal. Dengan handphone, warga binaan bisa memesan narkoba hingga melakukan penipuan,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).

ia mengingatkan seluruh petugas agar tidak mudah tergoda iming-iming uang dari warga binaan maupun bandar narkoba

untuk memfasilitasi masuknya barang terlarang ke dalam lapas.

“Hanya karena uang ratusan ribu rupiah, jangan sampai kita mengorbankan integritas dan nama baik institusi,” tegasnya.

Selain handphone ilegal, Abdul Waris juga menyoroti ancaman peredaran narkoba di dalam lapas. Ia mengungkapkan berbagai modus penyelundupan terus dilakukan, mulai dari melalui pengunjung, pelemparan dari luar tembok lapas, hingga penggunaan drone pada malam hari.

“Kami beberapa kali menemukan indikasi penggunaan drone untuk memasukkan barang terlarang. Ini sudah menjadi lampu merah bagi seluruh petugas,” katanya.

Abdul Waris menegaskan bahwa seluruh jajaran petugas lapas harus menjaga integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas. Ia juga mengin-

gatkan bahwa sanksi bagi petugas yang terlibat tidak hanya administratif, tetapi juga dapat diproses pidana.

“Jangan sampai kita sebagai pembina narapidana malah akhirnya menjadi narapidana karena terdoda,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, pihak lapas juga meminta dukungan dari aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, TNI, dan BNN, mengingat keterbatasan personel di tengah tingginya jumlah warga binaan.

Saat ini, Lapas Kelas IIA Baubau yang berkapasitas 196 orang dihuni sebanyak 498 warga binaan, sementara jumlah petugas hanya sekitar 93 orang.

Meski demikian, Abdul Waris menegaskan kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk menurunkan pengawasan dan pelayanan pembinaan kepada warga binaan.

Usai apel dan pembacaan ikrar, petugas lapas bersama aparat gabungan langsung melaksanakan razia serta tes urine terhadap petugas maupun warga binaan sebagai bentuk komitmen mewujudkan lapas bersih dari narkoba dan handphone ilegal.

Abdul Waris juga menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap pengawasan dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, LSM, hingga perguruan tinggi guna memastikan seluruh proses pembinaan berjalan sesuai aturan.

“Kami terbuka untuk diawasi. Semua ini demi menjaga marwah lapas dan menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan yang benar-benar memberi harapan bagi masyarakat,” tutupnya. (\*)

## Ujian Praktik Seni Budaya Kelas IX SMPN 1 Batauga Tampilkan Potensi dan Bakat Siswa

yang tidak suka menyanyi tapi berbakat di drama, maka itu yang ditampilkan,â€ jelas-nya.

Ia mengungkapkan bahwa latihan untuk kegiatan ini telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu, sehingga pada hari pelaksanaan siswa dapat menampilkan hasil terbaiknya. Dengan berakhirnya ujian praktik ini, seluruh rangkaian

evaluasi pembelajaran untuk kelas IX dinyatakan selesai.

Pengumuman kelulusan direncanakan akan dilakukan pada awal Juni 2026. Sementara itu, pihak sekolah juga akan memberikan apresiasi berupa sertifikat kepada siswa yang menunjukkan bakat dan prestasi di bidang tertentu.

“Biasanya setelah

pembagian rapor di akhir Juni, kami memberikan sertifikat bagi siswa berbakat. Ini bisa menjadi bekal mereka untuk melanjutkan ke sekolah favorit,” tambahnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pada tahun sebelumnya, sejumlah siswa berhasil melanjutkan pendidikan ke sekolah unggulan seperti SMA Negeri 1 Baubau, SMA Negeri

2 Baubau, serta beberapa sekolah di Batauga, berkat pengembangan bakat yang dilakukan selama di SMP.

Melalui kegiatan ini, pihak sekolah berharap potensi siswa, khususnya di bidang seni, dapat terus berkembang dan mendapatkan apresiasi hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. (\*)

## SMAN 2 Baubau Raih Juara Umum FLS3N Tingkat Kota, Borong 9 Medali Emas, Ini Dia Nama-namanya

serta beberapa kategori lainnya.

La Hidi memberikan apresiasi tinggi kepada tim pembina yang tetap maksimal mendampingi siswa meski dengan keterbatasan anggaran. Ia menyebut, dari total 16 cabang lomba, hanya dua yang terakomodasi dalam anggaran resmi.

“Namun berkat kerja sama dan dedikasi para guru pembina, kami tetap bisa mengikuti 14 cabang lomba dan hasilnya sangat membanggakan,” katanya.

Tak hanya di bidang seni, prestasi juga diraih di cabang olahraga. Pada ajang Kejuaraan Nasional Pencak Silat Anoa Championship di Kendari, siswa SMAN 2 Baubau berhasil meraih tiga medali emas, tiga perak, dan satu perunggu.

Selain itu, tim sekolah juga sukses meraih juara dua tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dalam lomba kreasi pengibaran bendera MPR RI dalam rangka Hari Konstitusi Nasional.

La Hidi berharap para siswa yang telah berprestasi dapat terus meningkatkan

kemampuan, terutama dalam menghadapi FLS3N tingkat provinsi.

“Harapan kami, siswa-siswa ini bisa kembali meraih hasil terbaik di tingkat provinsi bahkan mewakili Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional,”ujarnya.

Ia juga menyoroti peran penting guru pembina yang bekerja di luar jam mengajar tanpa dukungan honor tambahan akibat keterbatasan penggunaan dana BOS.

“Semoga apa yang dilakukan para pembina menjadi nilai ibadah. Mereka bekerja dengan penuh keikhlasan demi kemajuan siswa,”tambahnya.

Berikut beberapa nama siswa berprestasi dalam ajang FLS3N Kota Baubau:

Shofiah Sa'dana (Desain Poster, Juara 1)

Muhammad Najmuddin (Fotografi, Juara 1)

Muhamad Afgan (Fotografi, Juara 2)

Andi Faiz M.H (Instrumen Solo Gitar, Juara 1)

Sumina (Jurnalistik, Juara 1)

Mardianti (Jurnalistik, Juara 3)

Inezz Raysya M

(Kriya, Juara 1)

Putri Aryana P (Komik Digital, Juara 1)

Ulfiyah Khumairah (Komik Digital, Juara 2)

M. Alif Hidayat A (Nyanyi Solo Putra, Juara 1)

Maulidia Nofrianti (Monolog, Juara 1)

Leguina Elmianto (Monolog, Juara 2)

Nahlah Fuadi & Naylah Syaikhah M (Tari Kreasi, Juara 1)

Raisah M.R (Menulis Cerpen, Juara 2)

Nabila Dwi M.K (Nyanyi Solo Putri, Juara 3)

Prestasi ini menjadi bukti komitmen SMAN 2 Baubau dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berprestasi di bidang seni dan olahraga.

Dengan capaian tersebut, sekolah berharap dapat terus menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk berinovasi, berkarya, dan mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. (\*)

## Prestasi Gemilang SMAN 1 Batauga, 146 Siswa Lulus 100 Persen, 10 Siswa Diterima PTN Haluoleo Tanpa Tes



kelompok mata pelajaran Ilmu Alam (kelas XII A1, A2, dan A3) serta kelompok mata pelajaran lainnya (kelompok B dan C). Para siswa berprestasi tersebut juga diundang

untuk naik ke panggung bersama orang tua sebagai bentuk apresiasi dari sekolah.

Pihak sekolah berharap capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan

pada tahun-tahun mendatang, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. (\*)

## PDIP Tolak RUU Pemilu Jadi Inisiatif Pemerintah, Soroti Demokrasi



Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus menolak usul Partai Amanat Nasional (PAN) agar RUU Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah.

### Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Polemik mengenai arah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu kembali mengemuka di parlemen. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menolak usulan agar RUU Pemilu dijadikan sebagai usul inisiatif pemerintah. PDIP menilai langkah tersebut berpotensi memperbesar dominasi kekuasaan eksekutif terhadap kehidupan partai politik dan sistem demokrasi nasional.

Penolakan itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus, menyusul munculnya usulan dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang menginginkan pemerintah menjadi penguasul utama revisi regulasi pemilu tersebut.

Menurut Deddy, RUU Pemilu merupakan instrumen penting yang berkaitan langsung dengan eksistensi partai politik, mekanisme demokrasi, serta tata kelola kekuasaan di Indonesia. Karena itu, DPR sebagai representasi politik rakyat dinilai tetap harus menjadi pihak yang memegang inisiatif pembahasan.

"Menyerahkan inisiatif RUU Pemilu kepada pemerintah sama saja dengan menyerahkan nyawa partai politik dan demokrasi kepada kekuasaan," kata Deddy saat dihubungi, Minggu (9/5).

Ia menilai perbedaan pandangan antarpolisi dalam proses legislasi merupakan

hal yang wajar dalam negara demokrasi. Menurut dia, dinamika politik justru menjadi bagian penting untuk melahirkan regulasi yang lebih matang dan akomodatif terhadap berbagai kepentingan publik.

Deddy menegaskan bahwa pergulatan gagasan di parlemen tidak seharusnya dianggap sebagai hambatan politik. Ia bahkan menyebut perbedaan pendapat merupakan bagian alami dari proses demokrasi modern.

"Dalam keluarga saja bisa ada perbedaan dan pergulatan, apalagi dalam politik. Kalau takut perbedaan dan pergulatan ya tidak usah berpolitik atau bikin partai politik," ujarnya.

Pernyataan itu sekaligus menanggapi usulan Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Daulay, yang sebelumnya menyebut inisiatif pemerintah diperlukan untuk mengurangi potensi konflik dan tarik-menarik kepentingan partai politik sejak awal pembahasan RUU.

Saleh berpendapat, apabila pemerintah menjadi pengusul utama, maka perbedaan sikap partai politik dapat diminimalkan pada tahap awal dan difokuskan dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Kalau didasarkan atas inisiatif pemerintah, pergulatan pikiran dan agenda parpol dapat dihindari di awal pembahasan. Kalau pun ada perbedaan, nanti akan diakumulasi pada saat pembaha-

san DIM," kata Saleh seperti dikutip dari Detik.com.

Namun, Deddy mempertanyakan alasan di balik munculnya usulan tersebut. Ia menilai tidak lazim apabila undang-undang yang sangat menentukan masa depan politik nasional justru diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

"Tetapi UU yang vital bagi DPR malah diusulkan jadi inisiatif pemerintah. Ada apa?" ucapnya.

RUU Pemilu saat ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 sebagai usul inisiatif DPR. Meski demikian, hingga kini DPR belum memulai pembahasan resmi terhadap rancangan aturan tersebut, padahal tahapan Pemilu 2029 diperkirakan mulai berlangsung pada pertengahan 2026.

Dalam sejarah politik Indonesia, revisi aturan pemilu hampir selalu menjadi perdebatan panjang di parlemen. Sejak era Reformasi 1998, sistem pemilu Indonesia beberapa kali mengalami perubahan besar, mulai dari penerapan sistem proporsional terbuka, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, hingga pengaturan presidential threshold.

Pada Pemilu 2004, Indonesia untuk pertama kalinya menggelar pemilihan presiden secara langsung setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan itu menjadi tonggak penting demokrasi na-

sional karena memperluas partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin negara.

Sementara secara internasional, perdebatan mengenai campur tangan pemerintah dalam regulasi pemilu juga pernah terjadi di sejumlah negara demokrasi. Di Thailand dan Turki, misalnya, perubahan aturan pemilu yang terlalu dipengaruhi pemerintah sempat menuai kritik karena dianggap memperkuat dominasi kekuasaan terhadap oposisi politik.

Pengamat politik menilai pembahasan RUU Pemilu menjadi sangat penting karena akan menentukan arah sistem demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2029. Regulasi tersebut nantinya akan mengatur berbagai aspek strategis, mulai dari sistem pemilu, syarat pencalonan, metode konversi suara, hingga tata kelola penyelenggara pemilu.

Di sisi lain, lambannya pembahasan RUU Pemilu juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya keterlambatan kepastian hukum bagi partai politik maupun penyelenggara pemilu. Padahal, pengalaman pada pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan aturan yang terlalu dekat dengan tahapan pemilu kerap memicu polemik dan sengketa politik baru.

Perdebatan antara PDIP dan PAN itu memperlihatkan bahwa isu revisi Undang-Undang Pemilu masih akan menjadi salah satu agenda politik utama menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2029 mendatang. (\*)

## PKS Cetak Kader Muda Berbasis Spiritualitas dan Kepemimpinan Visioner



Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pelatihan terhadap kader muda mereka yang tergabung dalam Akademi Pemimpin Muda Indonesia (APMI) di kantor pusat partai, Jakarta, Minggu (9/5).

### Laporan: Radit

JAKARTA, BP- Partai Keadilan Sejahtera menegaskan pentingnya pembangunan karakter dan spiritualitas dalam membentuk pemimpin masa depan melalui pelatihan kader muda yang tergabung dalam Akademi Pemimpin Muda Indonesia (APMI). Kegiatan yang berlangsung di kantor pusat PKS, Jakarta, Minggu (9/5), itu menjadi bagian dari strategi regenerasi kepemimpinan partai berbasis nilai keimanan dan kepedulian sosial.

Presiden PKS, Al Muzammil Yusuf, mengatakan kepemimpinan yang kuat tidak hanya dibangun melalui kemampuan intelektual dan politik, tetapi juga harus ditopang fondasi spiritual yang kokoh.

"Jadilah pemimpin yang berakar kuat, bukan pemimpin yang melayang. Kuat akar nilai, spiritualitas, kepedulian, dan kebermanfaatan untuk sesama," ujar Al Muzammil dalam keterangannya kepada peserta pelatihan.

Menurut dia, APMI diharapkan menjadi ruang pembinaan bagi kader muda PKS untuk memperkuat keimanan sekaligus mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin bangsa di masa mendatang.

Ia menilai perjalanan sejarah dunia menunjukkan banyak perubahan besar lahir dari tangan generasi muda yang memiliki idealisme dan keyakinan kuat. Dalam sejarah Islam, misalnya, perjuangan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat banyak digerakkan oleh pemuda.

"Rasulullah bersa-

ma para sahabat rata-rata adalah pemuda. Dari sepuluh sahabat terbaik, empat di antaranya adalah pemuda. Mereka menorehkan sejarahnya dengan iman," katanya.

Al Muzammil juga mengangkat kisah Ashabul Kahfi dalam Alquran sebagai contoh keteguhan anak muda dalam mempertahankan keyakinan di tengah tekanan kekuasaan. Kisah tersebut, kata dia, menjadi simbol penting bahwa perubahan besar kerap lahir dari keberanian generasi muda.

"Melalui APMI, saya berharap terjadi kebangkitan keimanan pemuda PKS. Jangan berpikir ingin menggores tinta sejarah tanpa menancapkan iman di dada sebagai ruh perjuangan," ujarnya.

Dalam konteks nasional, pembinaan kader muda oleh partai politik dinilai menjadi kebutuhan penting di tengah tantangan demokrasi modern. Sejarah Indonesia juga menunjukkan peran sentral pemuda dalam perjalanan bangsa, mulai dari Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, hingga gerakan Reformasi 1998 yang mendorong perubahan politik nasional.

Di tingkat internasional, banyak tokoh dunia tercatat memulai kiprah kepemimpinannya sejak usia muda. Mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dikenal membawa semangat generasi muda dalam politik modern Amerika, sementara Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menjadi salah satu simbol kepemimpinan muda yang menekankan empati dan nilai ke-

manusiaan. Fenomena itu, menurut sejumlah pengamat politik, menunjukkan bahwa regenerasi kepemimpinan tidak hanya membutuhkan kecakapan teknokratis, tetapi juga integritas moral dan kemampuan membangun kedekatan sosial dengan masyarakat.

PKS menilai partai politik tidak boleh hanya dipandang sebagai kendaraan perebutan kekuasaan, melainkan juga institusi kaderisasi yang bertanggung jawab menyiapkan pemimpin berkualitas bagi bangsa.

Karena itu, pelatihan melalui APMI tidak hanya berisi penguatan wawasan politik, tetapi juga pembinaan karakter, etika publik, dan nilai spiritualitas yang dianggap penting dalam membangun kepemimpinan jangka panjang.

"Jadilah pemimpin yang kuat spiritualitas dan visioner," kata Al Muzammil menegaskan.

Program kaderisasi tersebut sekaligus menjadi upaya PKS memperkuat basis generasi muda di tengah meningkatnya partisipasi pemilih muda dalam politik nasional. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), kelompok pemilih muda atau generasi milenial dan Gen Z mendominasi komposisi pemilih pada Pemilu 2024.

Dengan kondisi itu, partai politik mulai berlomba memperkuat pendidikan politik dan kaderisasi generasi muda sebagai investasi kepemimpinan nasional pada masa mendatang. (\*)

## KPK Soroti Pengelolaan Aset Daerah dalam Rakor Antikorupsi di Sultra, Gubernur Sultra ASR Tegaskan Komitmen Bersama Wujudkan Pemerintahan Bersih



### Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan pengawasan aset daerah dalam agenda rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Tenggara, Rabu (6/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Tenggara.

Rapat koordinasi yang berlangsung selama tiga hari, mulai 6 hingga 8 Mei 2026, menghadirkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perwakilan legislatif. Agenda itu merupakan program Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, mengatakan tata kelola pemerintahan daerah masih membutuhkan penguatan meskipun tingkat integritas Sulawesi Tenggara tergolong cukup baik.

“Nilai Survei Penilaian Integritas atau SPI Sulawesi Tenggara berada pada angka 72,66. Ini menunjukkan kondisi yang cukup baik, tetapi aspek tata kelola masih harus diperkuat,” ujar Edi.

Menurut dia, indikator Monitoring,

Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tahun 2025 di Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 51,09. Angka tersebut dinilai masih menunjukkan adanya sejumlah kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan.

KPK juga menempatkan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu fokus pengawasan. Sejumlah aset pemerintah daerah disebut masih berada dalam proses penindakan, sementara sebagian lainnya memerlukan langkah pencegahan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di masa mendatang.

“Komunikasi menjadi kunci utama dalam mencegah korupsi. Pemerintah daerah harus berjalan sebagai satu kesatuan antara eksekutif dan legislatif,” kata Edi.

Ia menegaskan, hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Menurut dia, kedua unsur tersebut tidak hanya memiliki hak politik dan administratif, tetapi juga kewajiban menjaga kepentingan publik.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menyampaikan bahwa korupsi merupakan ancaman serius terhadap pembangunan daerah. Praktik korupsi, kata dia, tidak hanya menghambat pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga menurunk-

an kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak langsung terhadap pembangunan dan kepercayaan publik. Karena itu, pemberantasannya menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Andi Sumangerukka.

Ia menilai upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan harus membangun sistem tata kelola yang terbuka serta memperkuat pengawasan internal.

Menurut gubernur, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat hukum, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Dalam konteks nasional, agenda penguatan pencegahan korupsi terus menjadi prioritas pemerintah sejak era reformasi 1998. Pembentukan KPK pada 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi tonggak penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sejak berdiri, KPK telah menangani ratusan perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah, anggota legislatif, pejabat kementerian, hingga pelaku usaha. Berdasarkan data Transparency International, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam beberapa tahun tera-

khir masih menghadapi tantangan untuk mencapai standar negara-negara dengan tata kelola terbaik di dunia.

Secara internasional, upaya pemberantasan korupsi menjadi perhatian global sejak disepakatinya United Nations Convention against Corruption (UNCAC) pada 2003. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 sebagai bentuk komitmen memperkuat integritas pemerintahan dan kerja sama internasional dalam memerangi korupsi.

Sejumlah negara seperti Singapura, Denmark, dan Finlandia sering dijadikan contoh keberhasilan reformasi birokrasi dan penguatan pengawasan publik. Negara-negara tersebut menempatkan transparansi, digitalisasi layanan, serta pengawasan ketat terhadap anggaran sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan.

Di Indonesia, tren digitalisasi layanan publik dalam beberapa tahun terakhir juga mulai diarahkan untuk mempersempit ruang praktik korupsi, termasuk melalui sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan penguatan pengawasan berbasis teknologi.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPK berharap lahir langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (\*)

## Wali Kota Kendari Sambut Wamendagri dengan Jamuan Khas Daerah, HUT Kota Kendari Berskala Internasional



### Laporan: Mashuri

KENDARI, BP-Pemerintah Kota Kendari memanfaatkan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Kendari 2026 untuk memperkuat promosi budaya, pariwisata, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui jamuan kuliner tradisional di kawasan wisata Pantai Nambo, Sabtu (9/5/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri bersama delegasi internasional dari UCLG ASPAC.

Jamuan budaya itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Kendari Siska Karina Imran usai pelaksanaan upacara peringatan HUT Kota Kendari. Acara berlangsung dalam suasana santai di tepi Pantai Nambo dengan suguhan kuliner khas daerah dan pertunjukan seni tradisional.

Wakil Menteri Dalam Negeri bersama rombongan tampak menikmati berbagai sajian khas Kendari yang disiapkan pemerintah daerah sebagai bagian dari promosi kekayaan kuliner lokal Sulawesi Tenggara.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Kendari tidak hanya berkembang dari sisi pembangunan, tetapi juga memiliki kekuatan budaya, wisata, dan kuliner yang patut dikenal lebih luas,” ujar Siska Karina Imran dalam sambutannya.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua, Sekretaris Daerah Kota Kendari, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Kendari.

Kehadiran delegasi internasional menambah nilai strategis kegiatan tersebut. Sekretaris Jenderal UCLG

ASPAC, Bernadia Irawati Tjandradewi, turut menikmati suasana Pantai Nambo sambil menyaksikan pertunjukan budaya yang dibawakan siswa-siswi SDN 06 Kota Kendari.

“Budaya lokal seperti ini menjadi kekuatan penting bagi kota-kota di Asia Pasifik dalam membangun identitas dan pariwisata berkelanjutan,” kata Bernadia Irawati Tjandradewi di sela kegiatan.

Selain pertunjukan seni dan jamuan makan siang, rombongan Wakil Menteri Dalam Negeri juga meninjau lapak-lapak UMKM yang berada di sekitar kawasan Pantai Nambo. Para pelaku usaha memamerkan berbagai produk unggulan lokal, mulai dari makanan olahan, hasil kerajinan tangan, hingga produk ekonomi kreatif khas Sulawesi Tenggara.

Kunjungan itu mendapat sambutan antusias dari masyarakat dan pelaku usaha. Mereka berharap momentum HUT Kota Kendari dapat membuka peluang promosi produk lokal ke tingkat nasional maupun internasional.

Dalam agenda tersebut, pemerintah daerah juga menghadirkan Gerakan Pangan Murah (GPM) guna membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Program itu menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah yang terus diperkuat pemerintah pusat dan daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri menyebut keterlibatan UMKM dan kegiatan pangan murah dalam perayaan daerah merupakan langkah positif dalam memperkuat ekonomi masyarakat.

“Perayaan daerah seperti ini sebaiknya tidak hanya ser-

emonial, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri saat meninjau kawasan UMKM Pantai Nambo.

Secara historis, Pantai Nambo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kota Kendari yang mulai berkembang sejak awal 2000-an sebagai pusat wisata bahari dan ruang promosi budaya lokal. Kawasan tersebut kerap menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan berskala regional maupun nasional.

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan itu sejalan dengan program penguatan UMKM dan promosi produk lokal di berbagai kota di Indonesia.

Sementara secara internasional, pendekatan promosi budaya melalui festival kuliner dan seni tradisional telah menjadi strategi berbagai kota dunia dalam menarik wisatawan dan investor. Organisasi UCLG ASPAC sendiri selama ini aktif mendorong kerja sama antarwilayah di kawasan Asia Pasifik dalam bidang pembangunan perkotaan, budaya, dan ekonomi berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan di Pantai Nambo kemudian ditutup dengan keberangkatan Wakil Menteri Dalam Negeri menuju bandar udara untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta setelah menghadiri sejumlah agenda HUT Kota Kendari 2026. (\*)

# 4 BUTUR-BUTENG-BUSEL-BUTON

Selasa, 12 Mei 2026

BAUB AU POST

www.baubaupost.com

## Lakudo Juara Umum MTQ VI Buton Tengah, Wabup Dorong Prestasi Qurani



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Musabiqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-VI tingkat Kabupaten Buton Tengah resmi ditutup oleh Wakil Bupati Buton Tengah, Muh. Adam Basan, S.Sos., di Gedung Kesenian Kecamatan Lakudo, Sabtu malam (2/5/2026). Pada ajang tersebut, Kecamatan Lakudo berhasil meraih predikat juara umum setelah unggul dalam akumulasi nilai dari seluruh cabang lomba yang dipertandingkan.

Penutupan MTQ berlangsung meriah dan khidmat dengan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), dewan hakim, tokoh agama, panitia pelaksana, serta kafilah dari seluruh kecamatan di Kabupaten Buton Tengah.

Berdasarkan keputusan dewan hakim, posisi juara kedua diraih Kecamatan Gu, sedangkan Kecamatan Mawasangka menempati posisi ketiga pada perolehan nilai akhir MTQ tahun 2026 tersebut.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Muh. Adam Basan menegaskan bahwa pelaksanaan MTQ ti-

dak sekadar menjadi ajang kompetisi membaca Al-Qur'an, melainkan bagian penting dalam membangun karakter generasi muda yang religius dan berakhlak.

"MTQ bukan hanya perlombaan, tetapi juga momentum memperkuat syiar Islam dan membentuk generasi Qurani yang mampu menjadi teladan di tengah masyarakat," kata Adam Basan dalam sambutannya.

Ia juga meminta para qori dan qoriah yang berhasil meraih prestasi agar terus meningkatkan kemampuan dan tidak cepat merasa puas dengan pencapaian saat ini.

"Terus tingkatkan kemampuan dan jangan cepat berpuas diri, karena tantangan ke depan masih panjang. Kita berharap Buton Tengah mampu bersaing di tingkat provinsi hingga nasional," ujarnya.

Menurut Adam Basan, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menaruh perhatian besar terhadap pembinaan tilawatil Quran karena dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia berbasis nilai keagamaan.

Ia menambahkan, peran strategis LPTQ sangat dibutuhkan dalam menjaga kesinam-

bugan pembinaan peserta MTQ, terutama dalam menyiapkan kafilah yang mampu tampil kompetitif pada MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara mendatang.

"Pengelolaan LPTQ membutuhkan kerja keras, pemahaman yang baik, dan keikhlasan agar pembinaan generasi Qurani dapat berjalan secara berkelanjutan," tutur dia.

Selain memberikan apresiasi kepada para juara, Wakil Bupati juga mengingatkan peserta yang belum berhasil meraih prestasi agar tidak berkecil hati dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk terus belajar.

Ia turut menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara, dewan hakim, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan MTQ sehingga berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga penutupan.

Secara historis, pelaksanaan MTQ di Indonesia telah berlangsung sejak pertama kali digelar secara nasional pada 1968 di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak saat itu, MTQ berkembang menjadi agenda keagamaan nasional yang tidak hanya menampilkan

kemampuan membaca Al-Quran, tetapi juga memperkuat pendidikan Islam dan budaya literasi keagamaan di berbagai daerah.

Dalam perkembangan internasional, kompetisi tilawah Al-Qur'an juga rutin digelar di sejumlah negara Muslim seperti Arab Saudi, Mesir, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Ajang-ajang tersebut menjadi wadah lahirnya qori dan qoriah berprestasi dunia, sekaligus mempererat hubungan budaya Islam antarnegara.

Di Indonesia, MTQ telah melahirkan banyak qori dan qoriah nasional yang berhasil mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong pembinaan sejak tingkat kabupaten hingga provinsi guna mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan tilawah berkualitas.

Berakhirnya MTQ Ke-VI Kabupaten Buton Tengah diharapkan menjadi momentum memperkuat kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran serta meningkatkan semangat pembinaan generasi Qurani di seluruh wilayah daerah tersebut. (\*)

## Bupati Buton Tengah Dr Azhari Kenang Dedikasi Ketua DPRD Buteng yang Tutup Usia



BUTON TENGAH, BP- Duka mendalam menyelimuti Kabupaten Buton Tengah setelah Ketua DPRD Buton Tengah, Saal Musrimin Haadi, meninggal dunia pada Kamis (7/5/2026). Kepergian legislator muda itu tidak hanya meninggalkan kehilangan bagi keluarga, tetapi juga bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang selama ini mengenalnya sebagai sosok pemimpin yang aktif memperjuangkan aspirasi daerah.

Ribuan pelayat memadati rumah duka di Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Hadir dalam prosesi pelepasan tersebut Bupati Buton Tengah Dr. Azhari, Wakil Bupati Muh. Adam Basan, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat umum.

Dalam sambutannya, Bupati Azhari menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Ketua DPRD Buton Tengah yang dinilai memiliki dedikasi besar terhadap pembangunan daerah.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum husnul khatimah dan seluruh pengabdianya menjadi amal terbaik di sisi Allah SWT," ujar Azhari di hadapan para pelayat.

Menurut Azhari, kepergian almarhum menjadi kehilangan besar bagi Buton Tengah karena selama ini Saal Musrimin Haadi dikenal aktif membangun komunikasi antara lembaga legislatif dan eksekutif demi kepentingan masyarakat.

Ia mengungkapkan, sejak menjabat sebagai Bupati Buton Tengah, dirinya memiliki komunikasi yang intens dengan almarhum. Berbagai program strategis daerah kerap dibahas bersama demi mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.

"Saya merasa sangat didukung oleh beliau. Tidak pernah ada konflik atau perbedaan tajam. Kami selalu berdiskusi bagaimana memberikan yang terbaik untuk Buton Tengah," katanya.

Bupati Azhari juga mengenang semangat pengabdian almarhum yang tetap aktif mendampingi pemerintah daerah memperjuangkan program pembangunan hingga ke tingkat kementerian, meskipun dalam kondisi kesehatan yang menurun.

Sejumlah program strategis yang diperjuangkan bersama antara lain pengembangan Sekolah Rakyat melalui komunikasi dengan Kementerian Sosial, penguatan pendidikan tinggi di Buton Tengah, serta dukungan terhadap program keagamaan dan kebudayaan daerah.

"Setiap selesai pemaparan di kementerian, beliau selalu menambahkan bahwa DPRD mendukung penuh program pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat Buton Tengah," tutur Azhari.

Kepergian Saal Musrimin Haadi di usia yang belum genap 40 tahun dinilai menjadi pukulan berat bagi masyarakat Buton Tengah. Dalam usia relatif muda, almarhum telah dipercaya menduduki jabatan Ketua DPRD dan dikenal

sebagai figur yang mengedepankan dialog serta kebersamaan dalam menjalankan tugas politiknya.

Azhari mengatakan kepemimpinan almarhum mencerminkan semangat demokrasi lokal yang sehat. Menurutnya, hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif merupakan modal penting dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama di wilayah kepulauan seperti Buton Tengah.

Secara historis, hubungan sinergis antara kepala daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Sejak era reformasi 1998, pola pemerintahan daerah berubah menuju sistem yang lebih partisipatif dan terbuka, di mana DPRD memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Di tingkat nasional, sejumlah tokoh daerah yang dikenal mampu membangun komunikasi harmonis antara legislatif dan eksekutif terbukti berhasil mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Model kepemimpinan kolaboratif itu juga menjadi perhatian dalam berbagai forum pemerintahan internasional sebagai bagian dari praktik tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Dalam konteks global, lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia selama dua dekade terakhir terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif dan kolaboratif. Stabilitas hubungan antarlembaga pemerintahan dinilai berpengaruh terhadap efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Di hadapan masyarakat yang hadir, Azhari juga mengingatkan bahwa kematian merupakan ketetapan Tuhan yang tidak dapat dihindari oleh siapa pun. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran kehidupan.

"Hari ini kita didahului oleh saudara kita. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan waktunya tiba. Karena itu, mari kita memperbanyak amal ibadah dan saling memaafkan," ucapnya.

Ia pun meminta masyarakat untuk mengenang seluruh kebaikan almarhum serta menyampaikan kepada keluarga apabila masih terdapat janji atau urusan yang belum sempat diselesaikan semasa hidup.

Suasana haru menyelimuti prosesi pelepasan almarhum. Sejumlah pelayat tampak tidak kuasa menahan tangis saat jenazah diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir.

Kepergian Saal Musrimin Haadi menjadi catatan kehilangan bagi perjalanan politik dan pemerintahan di Buton Tengah. Sosoknya dikenang sebagai pemimpin muda yang tenang, komunikatif, dan konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur legislatif. (AR)

## Investasi Rp404 Miliar Perkuat Produksi Obat Dalam Negeri di Indonesia, Bukti Menkes Perkuat Industri Farmasi



Peliput: Andina L

JAKARTA, BP- Pemerintah terus memperkuat kemandirian sektor kesehatan nasional melalui pembangunan industri farmasi dalam negeri. Langkah tersebut ditandai dengan pembangunan fasilitas produksi farmasi milik PT Mitra Prima Internasional di Kawasan Industri Cakung, Jakarta Timur, dengan nilai investasi mencapai Rp404 miliar.

Ground breaking fasilitas produksi tersebut dihadiri Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada Rabu (30/4). Dalam kesempatan itu, Menkes menegaskan bahwa penguatan industri farmasi nasional menjadi bagian penting dari transformasi sistem kesehatan Indonesia.

Menurut Budi, ketahanan kesehatan suatu negara tidak hanya diukur dari kemampuan pelayanan medis, tetapi juga dari kapasitas memproduksi obat dan bahan baku farmasi secara mandiri. Selama bertahun-tahun, Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku obat atau Active Pharmaceutical Ingredient (API) dari sejumlah negara.

"Pertumbuhan sektor kesehatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Karena itu, industri dalam negeri harus diperkuat agar memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional," ujar Budi.

Ia menjelaskan, pemerintah kini mendorong berbagai investasi di sektor manufaktur farmasi melalui penyederhanaan regulasi dan pemberian insentif. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pengembangan industri kesehatan sekaligus memperluas lapangan pekerjaan.

Fasilitas produksi PT MPI ditargetkan rampung pada Oktober 2027 dengan kapasitas produksi mencapai 600 juta tablet per tahun. Selain meningkatkan suplai obat nasional, proyek tersebut diperkirakan menyerap sekitar 213 tenaga kerja baru.

Dalam pengembangannya, PT MPI menjalin kerja sama transfer teknologi dengan Dr. Reddys Laboratories Ltd.. Kolaborasi itu difokuskan untuk memproduksi sejumlah obat strategis, mulai dari obat anti-diabetes, neurologi hingga kardiovaskular.

Direktur perusahaan menyebut kerja sama internasional tersebut menjadi langkah penting untuk mempercepat penguasaan teknologi produksi obat modern di Indonesia. "Transfer teknologi menjadi bagian penting agar industri farmasi nasional mampu bersaing secara global," ujarnya.

Sejarah industri farmasi Indonesia menunjukkan ketergantungan impor ba-

han baku obat masih cukup tinggi. Data Kementerian Kesehatan dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan lebih dari 85 persen bahan baku obat nasional masih berasal dari luar negeri, terutama dari India dan China. Kondisi tersebut sempat menjadi perhatian serius ketika rantai pasok global terganggu saat pandemi COVID-19.

Pandemi menjadi momentum penting bagi banyak negara untuk memperkuat industri kesehatan domestik. Di tingkat global, negara-negara seperti India, China, dan Amerika Serikat mempercepat investasi industri farmasi untuk mengurangi risiko krisis pasokan obat di masa depan.

Indonesia sendiri mulai mempercepat transformasi industri farmasi sejak pandemi berlangsung pada 2020. Pemerintah saat itu mendorong pengembangan vaksin, alat kesehatan, hingga bahan baku obat dalam negeri guna meningkatkan ketahanan sektor kesehatan nasional.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung percepatan investasi industri farmasi melalui penyederhanaan layanan perizinan dan sertifikasi.

"Badan POM terus melakukan perbaikan

layanan, baik dalam proses sertifikasi maupun izin edar, dengan tetap mengedepankan aspek keamanan, khasiat, dan mutu," kata Taruna.

Selain itu, BPOM juga tengah menyiapkan skema conditional approval bagi obat-obatan inovatif yang bersifat esensial. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat akses masyarakat terhadap terapi modern dengan tetap mengikuti standar internasional.

Pengamat industri kesehatan menilai investasi di sektor farmasi memiliki efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain memperkuat ketahanan kesehatan, investasi tersebut dinilai mampu meningkatkan daya saing industri nasional, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi defisit impor produk kesehatan.

"Industri farmasi bukan hanya sektor kesehatan, tetapi juga bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional," ujar seorang analis industri kesehatan.

Ke depan, pemerintah berharap investasi seperti yang dilakukan PT MPI dapat menjadi pemicu lahirnya lebih banyak industri farmasi berbasis teknologi tinggi di Indonesia. Dengan demikian, target kemandirian obat nasional dan penguatan rantai pasok kesehatan dapat tercapai secara bertahap. (\*)

## BPOM Perkuat Pengawasan Daerah lewat Regulasi Baru Dana BOK POM

JAKARTA, BP- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di daerah melalui penerbitan Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM). Regulasi baru itu diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat transparansi anggaran, serta memastikan dana operasional di daerah tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga kualitas pengawasan produk yang beredar di masyarakat, terutama di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan digital dan distribusi pangan olahan nasional.

"Melalui petunjuk teknis yang lebih kuat dan berbasis data, kami memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memberikan hasil yang terukur dan berdampak nyata," ujar Taruna Ikrar dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (6/4/2026). Pada tahun ini, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik BOK POM difokuskan kepada 391 kabupaten/kota yang dinilai memiliki kebutuhan prioritas pengawasan obat dan makanan. Hingga tahap pertama penyaluran anggaran 2026, sebanyak 190 kabupaten/kota telah menerima dana, sedangkan 201 daerah lainnya masih dalam proses pencairan.

Taruna menegaskan, pengalokasian dana tidak diberikan kepada seluruh daerah secara merata setiap tahun, melainkan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan pengawasan di lapangan. Menurut dia, pendekatan tersebut dilakukan agar efektivitas penggunaan anggaran lebih optimal.

"Melalui DAK Nonfisik BOK POM, kami mendorong pemerintah daerah lebih aktif melakukan pengawasan agar produk yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan sesuai standar," katanya.

Dalam regulasi terbaru tersebut, BPOM memperkuat mekanisme penganggaran melalui sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan proses verifikasi dilakukan lebih sistematis. Pelaporan realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran juga kini berbasis platform digital guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan menggunakan indikator kinerja yang lebih terukur, termasuk tingkat kepatuhan pelaporan pemerintah daerah. BPOM menilai pola pengawasan berbasis data tersebut akan mempercepat identifikasi masalah di lapangan dan memperkuat pengendalian distribusi produk berisiko.

Data BPOM menunjukkan realisasi anggaran DAK Nonfisik BOK POM mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Tingkat penyerapan anggaran yang pada 2021 berada di angka 69,18 persen meningkat dan stabil pada kisaran 79 hingga 81 persen selama periode 2023-2025.

Meski alokasi anggaran nasional relatif stagnan pada kisaran Rp150 miliar per tahun dalam empat tahun terakhir, capaian tersebut dinilai mencerminkan perbaikan kualitas perencanaan program dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Secara historis, penguatan peng-

awasan obat dan makanan di Indonesia mulai mendapat perhatian besar setelah sejumlah kasus produk ilegal dan pangan mengandung bahan berbahaya terungkap dalam dua dekade terakhir. Pada 2016 misalnya, BPOM pernah menemukan peredaran vaksin palsu yang memicu evaluasi nasional terhadap rantai distribusi obat. Sementara pada 2022 dan 2023, pengawasan terhadap obat sirup mengandung emaran etilen glikol juga menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak pada keselamatan anak-anak.

Di tingkat internasional, penguatan pengawasan pangan dan obat menjadi tren global setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mendorong negara-negara memperkuat sistem keamanan pangan pascapandemi Covid-19. Banyak negara mulai mengembangkan sistem pengawasan digital berbasis risiko guna meminimalkan peredaran produk ilegal dan berbahaya.

Pengamat kebijakan kesehatan publik menilai penguatan sistem berbasis data seperti yang diterapkan BPOM sejalan dengan praktik internasional dalam tata kelola pengawasan modern. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan anggota Uni Eropa juga memperkuat integrasi data pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat respons terhadap potensi risiko kesehatan masyarakat.

Di lapangan, Dana BOK POM tidak hanya digunakan untuk pengawasan distribusi obat dan makanan, tetapi juga mendukung peningkatan sampling produk serta pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan olahan di daerah berisiko tinggi.

BPOM menilai pembinaan tersebut penting karena produk UMKM yang telah memenuhi standar keamanan dan legalitas memiliki peluang lebih besar masuk ke pasar ritel modern maupun platform perdagangan elektronik. Bahkan, sejumlah produk lokal dinilai mulai memiliki daya saing untuk menembus pasar ekspor.


"Dana BOK POM adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan," ujar Taruna Ikrar.

Namun demikian, BPOM mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi program di daerah. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterlambatan pencairan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kepatuhan pelaporan kegiatan di sejumlah wilayah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPOM akan memperkuat sosialisasi kepada pemerintah daerah, dinas kesehatan, pelaku usaha, dan masyarakat. Pengawasan internal dan evaluasi berkala juga akan terus dilakukan guna memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai ketentuan.

Taruna menambahkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pengawasan obat dan makanan nasional, terutama di tengah meningkatnya tantangan distribusi produk melalui perdagangan digital lintas wilayah.

Dengan penerapan regulasi baru tersebut, BPOM berharap pengawasan obat dan makanan di Indonesia menjadi lebih efektif, adaptif, dan mampu memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat di seluruh daerah. (ardi)

<p><b>PT FAREN GRAFIKA</b></p>  <p><b>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</b></p> <p>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</p> <p>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</p> <p>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruokan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</p>	<p>Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman</p>	<p>Layouter: Rinin Pracetak: Aditya Cetak: Jamaludin</p>	<p>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan &amp; Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana</p>	<p>Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri</p> <p>Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun</p> <p>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</p>
<p>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</p> <p>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</p>				

## Wamenkum Tegaskan Advokat Jadi Pilar Perlindungan HAM di Indonesia



Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengingatkan peran advokat sangat penting dalam penegakan hukum, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia

### Laporan: Alwan

JAKARTA, BP - Pemerintah menegaskan pentingnya posisi advokat sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Dalam perkembangan sistem hukum nasional yang terus berubah, advokat dinilai tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai penjaga hak-hak warga negara di hadapan proses peradilan.

Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, saat menghadiri pelantikan pengurus Peradi Profesional di Jakarta, Jumat (8/5). Dalam acara tersebut, Eddy menekankan bahwa keberadaan advokat memiliki peranan sentral dalam memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan HAM.

Menurut Eddy, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan ruang yang kuat bagi advokat untuk mendampingi masyarakat yang menjalani proses hukum sejak tahap pemeriksaan awal. Pendampingan itu berlaku terhadap tersangka, terdakwa, saksi, hingga korban.

"Peran advokat dititikberatkan dalam konteks perlindungan HAM terhadap individu karena merekalah yang melakukan pembelaan," ujar Eddy.

Ia menjelaskan, pembaruan KUHAP juga memperkuat kewenangan advokat dalam sistem peradilan pidana. Dalam aturan terbaru tersebut, advokat diberikan hak untuk mengajukan ke-

beratan terhadap proses hukum yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Tidak hanya itu, keberatan yang diajukan advokat kini wajib dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk penguatan transparansi sekaligus perlindungan terhadap hak warga negara yang berhadapan dengan hukum.

"Advokat tidak hanya mendampingi, tetapi juga berhak mengajukan keberatan dan dicatatkan di dalam berita acara pemeriksaan," kata Eddy menegaskan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto, menyatakan advokat merupakan mitra strategis aparat penegak hukum, termasuk KPK, dalam menjaga proses hukum yang adil dan akuntabel.

Menurut Setyo, hubungan antara advokat dan aparat penegak hukum tidak boleh dipandang sebagai hubungan yang saling berlawanan. Sebaliknya, keduanya harus bekerja dalam koridor hukum yang sama demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

"Di KPK, kami melihat advokat sebagai mitra strategis, bukan musuh. Rekan-rekan adalah bagian dari penegakan hukum yang memastikan proses berjalan sesuai koridor," ujar Setyo.

Meski demikian, Setyo mengingatkan pentingnya integritas profesi advokat. Ia menegaskan KPK tidak akan memberikan toleransi terha-

dap pihak-pihak yang mencoba menghambat proses hukum atau menyalahgunakan kewenangan profesi.

Setyo juga menyinggung konsep advokat modern dan intelektual yang diusung Peradi Profesional. Menurutnya, modernitas dalam dunia hukum bukan hanya soal kemampuan mengikuti perkembangan teknologi digital, tetapi juga berkaitan dengan kedalaman moralitas hukum.

Ia menilai tantangan penegakan hukum di era digital semakin kompleks, terutama dengan berkembangnya kejahatan siber, tindak pidana pencucian uang lintas negara, hingga korupsi berbasis teknologi. Karena itu, profesi advokat dituntut lebih adaptif dan memiliki kapasitas intelektual yang kuat.

Secara historis, penguatan peran advokat dalam perlindungan HAM di Indonesia mulai berkembang pesat sejak era reformasi 1998. Reformasi hukum kala itu mendorong lahirnya berbagai regulasi yang menjamin hak tersangka dan terdakwa memperoleh bantuan hukum secara layak.

Pada tingkat internasional, prinsip pendampingan hukum juga menjadi bagian penting dalam standar HAM global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui "Basic Principles on the Role of Lawyer's" tahun 1990 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum independen tanpa intimidasi maupun intervensi.

Di Indonesia sendiri, Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi tonggak penting dalam penguatan profesi advokat sebagai penegak hukum yang sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim. Regulasi tersebut sekaligus menempatkan advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri.

Sementara itu, Ketua Umum Peradi Profesional, Harris Arthur Hedar, mengatakan organisasinya hadir sebagai respons atas kebutuhan zaman dan dinamika hukum yang semakin kompleks.

Ia menegaskan bahwa Peradi Profesional tidak dibentuk untuk menciptakan perpecahan di kalangan advokat, melainkan untuk memperkuat kualitas organisasi profesi agar lebih siap menghadapi tantangan global.

"Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan dan bukan hadir karena konflik. Tetapi sebagai jawaban atas kebutuhan zaman," ujar Harris.

Menurut Harris, organisasi advokat saat ini harus mampu membangun sistem yang modern, memperkuat intelektualitas anggota, menjaga etika profesi, serta memiliki keberanian dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi advokat dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat reformasi hukum nasional. Dengan penguatan tersebut, perlindungan HAM dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan diharapkan semakin meningkat di masa mendatang. (\*)

## Polisi Sita Rp1,9 Miliar dari Operasi Judi Daring Jaringan Asing



Bareskrim Polri menyita uang senilai Rp1,9 miliar dari pengungkapan kasus tindak pidana perjudian online jaringan internasional di daerah perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta.

JAKARTA, BP - Bareskrim Polri menungkap praktik perjudian online jaringan internasional yang beroperasi di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap ratusan warga negara asing (WNA) dan menyita uang tunai senilai Rp1,9 miliar beserta sejumlah mata uang asing yang diduga berkaitan dengan aktivitas judi daring lintas negara.

Pengungkapan kasus itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Wira Satya Triputra, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (9/5). Polisi menyebut lokasi yang digerebek merupakan pusat operasional judi online yang telah beroperasi selama kurang lebih dua bulan.

Selain uang rupiah, penyidik juga mengamankan valuta asing berupa 53,82 juta dong Vietnam dan US\$10.210. Seluruh barang bukti tersebut kini tengah didalami untuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan perjudian internasional itu.

"Ini berbagai macam mata uang. Nanti perincian mungkin akan kami sampaikan lebih lanjut, tapi yang pasti itu," kata Wira.

Dalam operasi tersebut, aparat kepolisian mengamankan sebanyak 321 WNA. Dari jumlah itu, 275 orang telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat langsung dalam aktivitas perjudian daring yang dijalankan dari gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk.

Menurut hasil pemeriksaan sementara, gedung tersebut memang difungsikan secara khusus sebagai tempat operasional judi online. Para pekerja asing itu tinggal di sekitar kawasan

tower tempat mereka bekerja sehingga aktivitas operasional dapat berjalan selama 24 jam.

"Untuk tempat tinggal mereka terletak di seputaran tower ini," ujar Wira.

Bareskrim juga mendalami server dan alamat protokol internet (IP) yang digunakan jaringan tersebut. Penelusuran dilakukan guna mengidentifikasi pengendali utama, jalur komunikasi digital, hingga kemungkinan keterlibatan jaringan lintas negara lainnya.

Polisi menduga sebagian besar WNA yang diamankan sudah mengetahui tujuan kedatangan mereka ke Indonesia untuk bekerja di perusahaan judi online. Meski demikian, mereka disebut hanya berperan sebagai operator lapangan dan bukan aktor intelektual di balik jaringan perjudian tersebut.

"Para pelaku yang diamankan ini merupakan pelaksana operasional, bukan otak utama jaringan internasionalnya," kata Wira.

Untuk pengembangan penyidikan, Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Koordinasi dilakukan guna menelusuri transaksi mencurigakan, status keimigrasian para pelaku, dan kemungkinan tindak pidana lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Kasus perjudian online lintas negara dalam beberapa tahun terakhir memang menjadi perhatian serius aparat penegak hukum di Indonesia. Pemerintah mencatat perputaran dana judi online terus meningkat seiring perkembangan teknologi digital dan penggunaan transaksi lintas negara berbasis elektronik.

Secara historis, Indonesia beberapa kali menjadi target operasi

jaringan judi online internasional. Pada 2023 hingga 2025, aparat kepolisian dan kementerian terkait berkali-kali mengungkap praktik perjudian daring yang dikendalikan sindikat asing dengan memanfaatkan apartemen, rumah toko, hingga gedung perkantoran sebagai pusat operasional.

Fenomena serupa juga terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Laos. Negara-negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir menjadi pusat aktivitas perjudian daring internasional yang melibatkan ribuan pekerja asing dan transaksi bernilai miliaran dolar Amerika Serikat.

Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan jaringan perjudian online global kerap terhubung dengan tindak pidana lain, seperti pencucian uang, penipuan digital, perdagangan manusia, hingga penyalahgunaan dokumen perjalanan lintas negara. Karena itu, pengungkapan kasus di Hayam Wuruk dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mempersempit ruang gerak sindikat kejahatan siber internasional.

Polri menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk memburu aktor utama dan menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain yang masih beroperasi di Indonesia. Aparat juga membuka peluang kerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional guna mengungkap keterkaitan sindikat tersebut dengan jaringan perjudian global.

"Kami juga akan melakukan koordinasi dengan para stakeholder terkait, dalam hal ini dengan PPKATK kemudian dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk pengembangan lebih lanjut," ujar Wira. (\*)

## Walikota Baubau HYF dan Wawali Wa Ode Hamsina Dukung Reformasi Layanan Pertanahan dan Pengamanan Aset Usai Hadiri Rakor KPK dan ATR/BPN di Sultra



### Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP - Pemerintah Kota Baubau menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola aset daerah dan pelayanan pertanahan yang transparan melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset Barang Milik Daerah (BMD) Wilayah Sulawesi Tenggara di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (07/05/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung Wali Kota Baubau Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota Baubau Wa Ode Hamsinah Bolu. Kegiatan itu merupakan kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam forum tersebut, penguatan pelayanan publik di sektor pertanahan menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah daerah diminta mempercepat pembenahan administrasi aset dan tata ruang guna mencegah praktik korupsi yang selama ini kerap terjadi dalam pengelolaan lahan dan aset pemerintah.

Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka yang membuka kegiatan itu menekankan pentingnya reformasi layanan pertanahan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Transformasi pelayanan pertanahan

harus dilakukan secara serius agar tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Andi Sumangerukka dalam sambutannya.

Wali Kota Baubau Yusran Fahim menyatakan bahwa pengamanan aset daerah bukan hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

"Pemerintah Kota Baubau berkomitmen mendukung langkah-langkah pencegahan korupsi melalui penataan aset daerah yang tertib administrasi, legal, dan transparan," kata Yusran Fahim.

Menurut Yusran, aset pemerintah daerah yang memiliki kepastian hukum akan memudahkan proses pembangunan dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Karena itu, koordinasi lintas lembaga dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan.

Rakor tersebut juga membahas sembilan paket kerja sama strategis yang menjadi prioritas nasional dalam reformasi layanan pertanahan dan tata ruang. Program itu meliputi integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, serta percepatan pendaftaran tanah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi den-

gan sistem Online Single Submission (OSS), sensus pertanahan berbasis geospasial, hingga integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) ke dalam RTRW daerah.

Program lain yang menjadi perhatian ialah optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Wakil Wali Kota Baubau Wa Ode Hamsinah Bolu menilai sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan ATR/BPN menjadi langkah penting dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.

"Kolaborasi seperti ini penting agar tata kelola pertanahan semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif," ujarnya.

Secara historis, persoalan pertanahan memang menjadi salah satu sektor yang rawan korupsi di Indonesia. Data Komisi Pemberantasan Korupsi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sengketa lahan, penerbitan izin, serta penguasaan aset pemerintah daerah menjadi kasus yang cukup dominan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Pada tingkat nasional, pemerintah sejak 2017 juga terus mendorong program reforma agraria dan percepatan sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL). Program tersebut ditargetkan mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus mengurangi konflik agraria di berbagai daerah.

Sementara itu, secara internasional, reformasi tata kelola pertanahan juga menjadi perhatian lembaga global seperti World Bank dan United Nations. Kedua lembaga tersebut menilai transparansi administrasi pertanahan berperan penting dalam meningkatkan investasi, memperkuat perlindungan hak masyarakat, dan menekan praktik korupsi.

Di sejumlah negara seperti Singapura dan Korea Selatan, digitalisasi layanan pertanahan terbukti mampu mempercepat pelayanan publik sekaligus menutup celah penyalahgunaan kewenangan dalam pengurusan lahan dan aset negara.

Rakor di Sulawesi Tenggara itu turut dihadiri kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, jajaran Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan kabupaten/kota, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, serta tim teknis dari KPK dan ATR/BPN.

Melalui forum tersebut, seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat pembenahan sistem pertanahan demi mewujudkan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan berintegritas. (\*)

## Ketua TP PKK Baubau Hj Sitti Aryati Yusran Serukan Perangi Zero-Dose Melalui Imunisasi Demi Generasi Emas 2045



### Laporan: Andina

BAUBAU, BP - Pemerintah Kota Baubau terus memperkuat upaya perlindungan kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan Seminar Pekan Imunisasi Dunia (PID) Tahun 2026 yang digelar di Baruga Kecamatan Sorawolio, Kamis (07/05/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kampanye global peningkatan cakupan imunisasi guna mencegah berbagai penyakit menular yang masih mengancam anak-anak dan kelompok rentan.

Seminar bertema 'Wujudkan Imunisasi Lengkap untuk Perlindungan Sepanjang Usia' itu secara resmi dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kota Baubau, Hj Sitti Aryati Yusran. Acara dihadiri kader PKK, kader Posyandu, tenaga kesehatan, unsur pemerintahan kecamatan, serta masyarakat.

Dalam sambutannya, Hj Sitti Aryati Yusran menegaskan bahwa imunisasi bukan sekadar program rutin pelayanan kesehatan, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Menurut dia, keberhasilan imunisasi akan menentukan kualitas generasi mendatang.

"Imunisasi adalah hak setiap anak dan investasi kesehatan jangka panjang agar mereka tumbuh menjadi generasi yang tangguh dan produktif," ujar Hj Sitti Aryati Yusran di hadapan peserta seminar.

Ia menjelaskan, Pekan Imunisasi Dunia yang diperingati setiap April hingga Mei merupakan momen penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat vaksinasi

bagi seluruh kelompok usia, mulai bayi, anak-anak, remaja, hingga lansia.

Dalam forum tersebut, Ketua TP PKK Kota Baubau juga mengingatkan pentingnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mendukung program imunisasi nasional. Menurutnya, edukasi yang tepat dapat menghilangkan keraguan masyarakat terhadap vaksin.

"Saya mengajak seluruh orang tua, jangan takut. Imunisasi itu aman dan sangat penting untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity," katanya.

Ia menambahkan, salah satu tantangan yang masih dihadapi pemerintah adalah keberadaan anak berstatus Zero-Dose, yakni anak yang belum pernah menerima imunisasi sama sekali. Karena itu, kader PKK dan Posyandu diminta menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.

"Target utama kita adalah memastikan tidak ada lagi anak yang tertinggal dari layanan imunisasi dasar lengkap maupun lanjutan," ujarnya.

Secara historis, program imunisasi telah menjadi salah satu intervensi kesehatan paling efektif di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat imunisasi mampu menyelamatkan sekitar 4 hingga 5 juta jiwa setiap tahun dari penyakit seperti difteri, tetanus, pertusis, influenza, dan campak.

Di Indonesia sendiri, program imunisasi nasional mulai diperkuat sejak pelaksanaan Program Pengembangan Imunisasi (PPI) pada tahun 1977. Program tersebut kemudian berha-

sil menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, termasuk keberhasilan Indonesia memperoleh sertifikat bebas polio dari WHO kawasan Asia Tenggara pada tahun 2014.

Namun demikian, pandemi Covid-19 sempat mempengaruhi cakupan imunisasi dasar di berbagai daerah. Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan adanya penurunan layanan imunisasi selama masa pandemi yang berdampak pada meningkatnya risiko munculnya kembali kasus campak, rubella, dan polio di sejumlah wilayah.

Karena itu, pemerintah pusat maupun daerah kini terus mengencangkan edukasi dan pelayanan imunisasi untuk mengejar ketertinggalan cakupan vaksinasi. Langkah tersebut juga sejalan dengan target pembangunan kesehatan menuju Generasi Emas Indonesia 2045.

Sementara itu, penyakit yang menjadi fokus pencegahan melalui imunisasi meliputi campak dan rubella, polio, difteri, hepatitis B, pertusis, tuberkulosis, pneumonia, tetanus, hingga diare. Seluruh penyakit tersebut dapat dicegah melalui pemberian vaksin secara lengkap dan tepat waktu.

Melalui Seminar Pekan Imunisasi Dunia 2026, Pemerintah Kota Baubau berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi semakin meningkat sehingga cakupan imunisasi di seluruh wilayah dapat lebih merata.

"Diharapkan kegiatan ini menjadi katalisator bagi Kota Baubau dalam mencapai cakupan imunisasi yang merata demi menyongsong Generasi Emas 2045 yang sehat, cerdas, dan berkualitas," tutur Hj Sitti Aryati Yusran. (\*)